

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

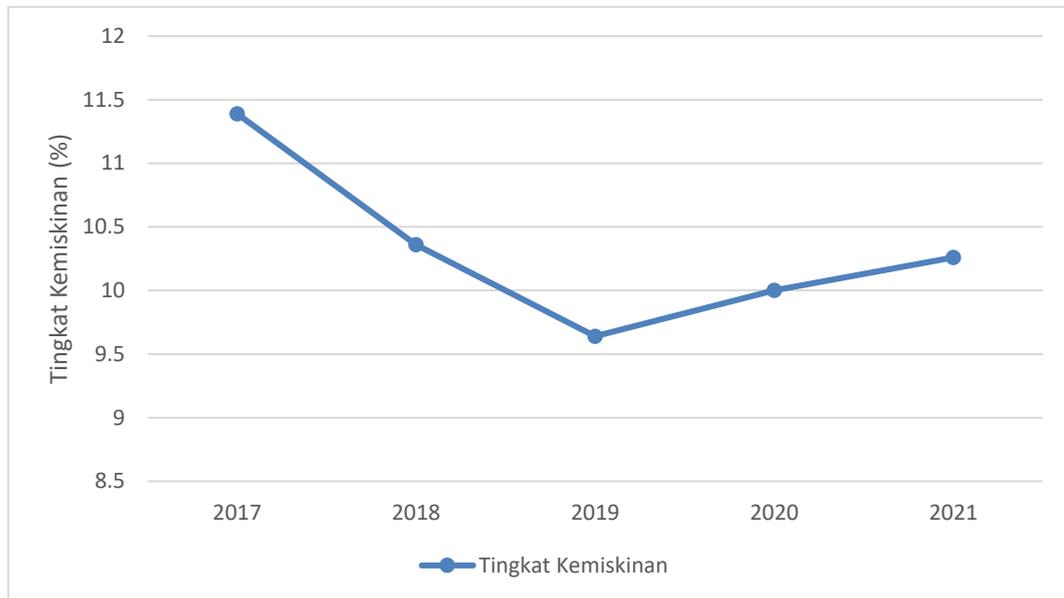
Kemiskinan merupakan persoalan yang signifikan di Indonesia dan juga banyak negara berkembang lainnya. Kemiskinan mengacu pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak mempunyai penghasilan yang memadai guna mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses terhadap makanan yang bergizi, perumahan yang layak, pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, dan layanan dasar lainnya. Pencapaian pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan kesempatan kerja yang terbatas merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan dapat berkontribusi pada kemiskinan. Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat berkontribusi terhadap siklus kemiskinan yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan juga merupakan suatu wacana yang kompleks dan menarik untuk diperbincangkan. Memahami akar penyebab kemiskinan dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya merupakan tantangan yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Rendahnya tingkat hidup menjadi parameter yang sering digunakan untuk menakar kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dapat digunakan sebagai indeks guna menilai kedudukan sosial ekonomi daerah dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. mencerminkan sejauh mana sebagian penduduk di suatu daerah dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagaimana pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, dan akses kepada layanan publik (Angga, 2018). Tingkat kemiskinan umumnya diukur melalui

membandingkan penghasilan atau konsumsi rumah tangga dengan garis kemiskinan, atau garis kemiskinan relatif. Garis kemiskinan relatif mencerminkan perbandingan pendapatan atau konsumsi seseorang dengan rata-rata atau median pendapatan atau konsumsi di suatu daerah. Kemiskinan sering terjadi dengan tingkat yang lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, lapangan kerja yang terbatas dan kurangnya keberagaman sektor ekonomi di pedesaan dapat membuat penduduk pedesaan sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai dan pendapatan yang layak. Selain itu, kebanyakan penduduk di desa hanya mengandalkan sektor pertanian secara tradisional untuk perekonomiannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), penduduk miskin perkotaan sebanyak 6,56% pada tahun 2019 dan akan melonjak menjadi 7,38% pada tahun 2020. Sementara itu, proporsi penduduk pedesaan yang hidup dalam kemiskinan sebesar 12,60% pada tahun 2019, dan akan bertambah menjadi 12,82% pada tahun 2020. Terlihat bahwa peningkatan proporsi penduduk miskin di pedesaan (dari 12,60% menjadi 12,82% antara tahun 2019 dan 2020) lebih besar dibandingkan di perkotaan (dari 6,56% menjadi 7,38%). Ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di daerah pedesaan cenderung mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah perkotaan dalam rentang waktu tersebut. Seperti halnya kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan kuantitas penduduk 964.253 pada tahun 2022.

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kabupaten Ponorogo 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2022

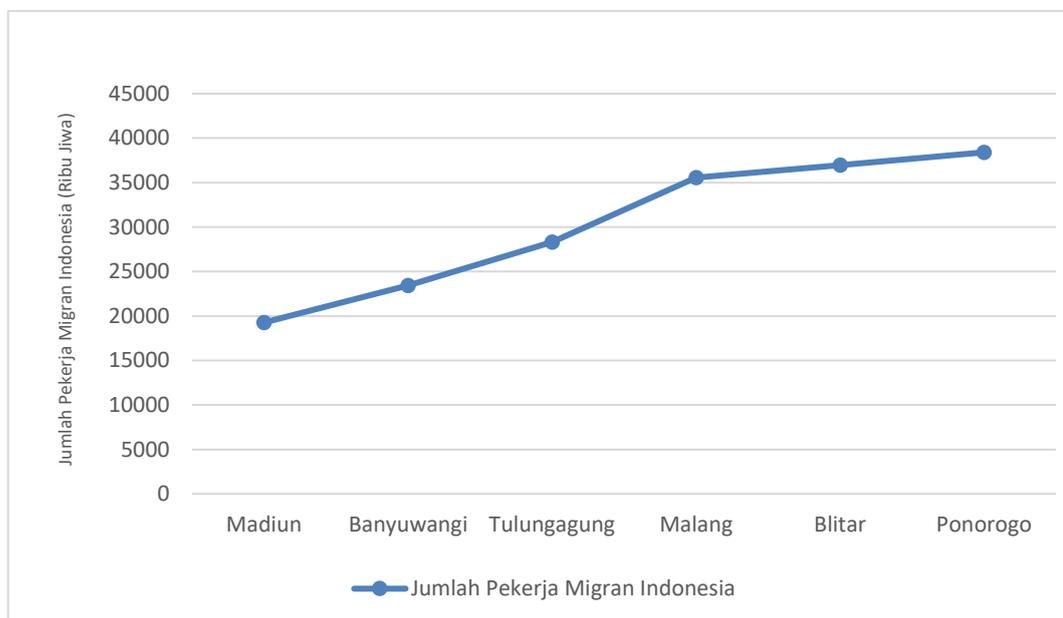
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo (2022), menunjukkan tren bertambahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo selama periode 2017 hingga 2021. Di tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 9,64%. Kemudian, pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 10%. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi peningkatan lebih lanjut dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,26%. Ini menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemiskinan yang sedang berlangsung khususnya di Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu faktor yang mendorong perpindahan penduduk antar negara atau migrasi internasional. Fenomena ini dilandasi oleh berbagai faktor salah satunya keterbatasan lapangan pekerja yang merupakan pendorong masyarakat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keterbatasan lapangan pekerjaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi

di suatu daerah dapat menyebabkan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan secara layak. Akibatnya, beberapa individu atau keluarga memilih untuk mencari kesempatan kerja di negara lain yang menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik. Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang memutuskan bekerja di luar negeri. Mereka meninggalkan negara asalnya untuk mencari pekerjaan di negara lain, dengan impian memperoleh gaji yang lebih baik dan memulihkan kondisi finansial pribadi dan keluarganya di Indonesia. Hal ini tergambar dari informasi yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menyatakan bahwa pengirim pekerja migran terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Ponorogo (BP2MI, 2019). Oleh sebab itu masyarakat khususnya Kabupaten Ponorogo terpengaruh terhadap seseorang menjadi Pekerja Migran Indonesia dikarenakan faktor ekonomi (BNP2TKI, 2020).

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang menyumbangkan Pekerja Migran Indonesia terbanyak dan salah satu bukti yaitu adanya peningkatan jumlah usaha penyedia jasa penyalur tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo dapat menjadi indikasi meningkatnya minat dan permintaan dari masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Perusahaan penyedia jasa penyalur tenaga kerja bekerja sama dengan agen-agen atau perekrut di negara tujuan untuk memfasilitasi perekrutan, proses legalitas, persiapan keberangkatan, dan pengiriman pekerja migran. Penyedia jasa juga memberikan informasi, pelatihan, dan bimbingan terhadap kandidat pekerja migran mengenai persyaratan, hak dan kewajiban, beserta lingkungan kerja di negara tujuan. Untuk mngurangi kemiskinan, sarana yang dapat digunakan yaitu menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja

Migran Indonesia seringkali diasosiasikan dengan tenaga kerja yang memiliki keterbatasan ketrampilan atau kemahiran dibidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Dalam beberapa kasus, individu yang bekerja sebagai PMI mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan atau pelatihan formal yang lebih tinggi. Mereka berharap bahwa pekerjaan di luar negeri akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pekerja Migran Indonesia Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2022

Berdasarkan keterangan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 38.408 jiwa. Jumlah tersebut mengindikasikan tingginya minat dan partisipasi masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam mencari peluang kerja di luar negeri. Kehadiran PMI dari Kabupaten Ponorogo yang bekerja di luar negeri dapat berkontribusi pada peningkatan remitansi atau pengiriman uang ke negara asal. Remitansi ini dapat

memberikan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga di Kabupaten Ponorogo. Peningkatan remitansi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli penduduk, serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal (Maarif, 2018). Pekerja Migran Indonesia (PMI) berupaya untuk memastikan bahwa remitansi yang mereka hasilkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan status sosial keluarga mereka, tetapi juga pada investasi dan pengembangan daerah asal serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal. Dalam upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya dapat dilakukan kebijakan penempatan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan menyediakan kesempatan dan akses kerja di luar negeri bagi pekerja migran, kebijakan ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja di dalam negeri.

Menurut BI atau Bank Indonesia (Muhamba, 2021) Remitansi merupakan penghasilan yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri ke dalam negeri. Kontribusi remitansi terhadap perekonomian Indonesia dapat signifikan. BP2MI menjelaskan remitansi merupakan salah satu penyumbang perolehan devisa terbanyak dalam APBN di Indonesia sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Sukirno, 2006). Dalam perkembangannya, BP2MI berperan penting dalam memberikan devisa dan pengentasan kemiskinan melalui remitansi ke daerah asal pekerja migran. Remitansi yang diterima juga mempunyai efek sosial yang positif (BP2MI, 2022).

Pengiriman uang atau remitansi dari pekerja migran dapat memiliki efek

positif pada pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga di suatu negara, baik di perkotaan ataupun dipedesaan. Hal ini mampu menghasilkan efek ganda yang signifikan dalam perekonomian. Peningkatan jumlah remitansi yang diterima akan dapat meningkatkan sumber anggaran yang tersedia untuk dikenakan dalam berbagai bentuk investasi di negara penerima. Investasi tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi di negara penerima. Ketika PMI mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia, mata uang asing yang mereka kirim harus ditukar dengan mata uang lokal, yaitu rupiah. Proses pertukaran mata uang ini menyebabkan permintaan terhadap rupiah meningkat yang pada akhirnya memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana pengaruh jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Remitansi terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Remitansi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah Pekerja Migran Indonesia mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah Remitansi mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis jumlah Pekerja Migran Indonesia terhadap tingkat

kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menganalisis Remitansi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), Remitansi, dan Tingkat Kemiskinan.
2. Periode waktu yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data tahunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian dan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang pengaruh jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Remitansi terhadap tingkat Kemiskinan.

2. Bagi Pihak Yang Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan landasan kebijaksanaan bagi upaya perbaikan.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang untuk lebih mewujudkan penduduk yang lebih baik di Kabupaten Ponorogo.